

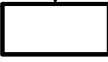


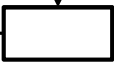
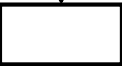




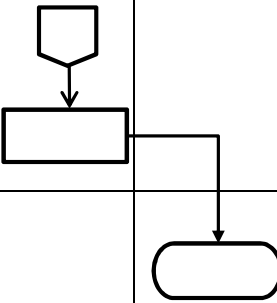
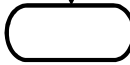


PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOLAKA

Nomor SOP	: 14 Tahun 2018
Tanggal Pembuatan	: 1 Agustus 2018
Tanggal Revisi	: 3 September 2018
Tanggal Efektif	: 24 September 2018
Disahkan oleh	Sekretaris DPRD Kabupaten Kolaka <u>Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si</u> Pembina Utama Muda, Gol. IV/c NIP. 19570523 198205 1 001
Nama SOP	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Selaku Kepala Daerah
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka 3. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka	Kualifikasi 1. Mengetahui Peraturan Tata Tertib DPRD 2. Memahami Administrasi ringan 3. Mengetahui Tupoksi Sekretariat DPRD
Keterkaitan : 1. Surat Masuk 2. SOP Pembuatan Risalah Rapat-Rapat 2. SOP Publikasi kegiatan DPRD	Kelengkapan : 1. Buku Agenda 2. Dokumen LKPJ 3. Dokumentasi
Peringatan : Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Selaku Kepala Daerah akan terkendala apabila terjadi penyimpangan dalam prosedurnya	Pencatatan dan Pendataan : Database Sekretariat DPRD

Prosedur : Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Selaku Kepala Daerah

No.	Aktifitas	Pelaksanaan							Mutu Baku			
		Bupati	DPRD	Pimpinan DPRD	Badan Musyawarah	Sekwan	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Subag Fasilitasi Pengawasan	Staf	Kelengkapan	Waktu / Hari	Output
1	Bupati menyampaikan Pengantar, Dokumen LKPJ Bupati selaku Kepala Daerah									Dokumen LKPJ		Penyampaian Raperda
2	Pimpinan DPRD mendisposisi ke Sekretaris Dewan Dokumen LKPJ Bupati untuk dijadwalkan pembahasannya									Dokumen LKPJ	15 Menit	
3	Sekwan menugaskan Kabag Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan untuk menyampaikan Dokumen LKPJ Bupati ke Pimpinan dan Anggota DPRD sebelum dijadwalkan pembahasannya									Dokumen LKPJ	15 Menit	
4	Kabag Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan menugaskan Kasubag Fasilitasi Penganggaran untuk menyampaikan Dokumen LKPJ Bupati ke Pimpinan dan Anggota DPRD sebelum dijadwalkan pembahasan sebelum dijadwalkan pembahasannya									Dokumen LKPJ	15 Menit	
5	Kasubag Fasilitasi Penganggaran menugaskan staf untuk menyampaikan Dokumen LKPJ Bupati ke Pimpinan dan Anggota DPRD sebelum dijadwalkan pembahasannya									Dokumen LKPJ	1 Jam	
6	staf menyampaikan dokumen Raperda tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke Pimpinan dan Anggota DPRD sebelum dijadwalkan pembahasan									Dokumen LKPJ	1 Jam	
7	Badan Musyawarah melaksanakan rapat penjadwalan LKPJ Bupati									Dokumen LKPJ	2 Jam	
8	Pimpinan mengeluarkan undangan Pembahasan Raperda			 						Jadwal Pembahasan	1 Jam	

9	Pembahasan LKPJ <i>* Rapat Paripurna Penjelasan Bupati</i> <i>* Pendalaman Materi Anggota DPRD</i> <i>* Penyampaian Rekomendasi LKJ</i>								1) Dokumen LKPJ, 2) Rekomendasi DPRD	2 bulan	1) Persetujuan Bersama 2) Keputusan DPRD 3) Risalah Pembahasan
10	Pimpinan DPRD menyampaikan Rekomendasi Dewan ke Bupati								1. Rekomendasi DPRD	3 Hari	

